



PAPER – OPEN ACCESS

Multikulturalisme dan Inklusi Sosial di Indonesia dalam Perspektif Historiografi

Author : Bambang Purwanto
DOI : 10.32734/lwsa.v2i2.721
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 2 Issue 3 – 2019 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Multikulturalisme dan Inklusi Sosial di Indonesia dalam Perspektif Historiografi

Multiculturalism and Social Inclusion in Indonesia in the History of Historiography

Bambang Purwanto

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

purwantougma@yahoo.co.uk

Abstrak

Dalam perkembangannya sejak tahun 1960-an hingga kini, makna dan ruang lingkup multikulturalisme tetap masih terus diperdebatkan sebagai sebuah konsep. Secara umum multikulturalisme mengacu pada pengakuan terhadap keanekaragaman dan perbedaan yang hidup dalam kesetaraan secara harmonis dan bermartabat. Diskursus tentang konsep multikulturalisme dengan berbagai konsep tandingan seperti multi-etnis, multi-agama, intercultural dll. terkait erat dengan keadaan sosi-kultural masyarakatnya. Dalam mengulas soal ini perspektif historiografi. Dalam perspektif historiografi multikulturalisme dan inklusi sosial di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dikhotomi internal dan beban masa lalu yang menjadi warisan kolonialisme di Indonesia.

Kata Kunci: multikulturalisme, inklusi sosial, historiografi

Abstract

Since the 1960s until now, the meaning and scope of multiculturalism continues to be debated as a concept. In general, multiculturalism refers to the recognition of diversity and differences that live in equality in a harmonious and dignified manner. Discourse on the concept of multiculturalism with various counter concepts such as multi-ethnic, multi-religious, intercultural etc. closely related to the socio-cultural state of the community. In reviewing this question historiography perspective. In the perspective of multiculturalism historiography and social inclusion in Indonesia is inseparable from the influence of the internal dichotomy and the past burden, which is the legacy of colonialism in Indonesia.

Keywords: Multiculturalism, Social Inclusion, Historiography

1. Latar Belakang

Di dalam sebuah masyarakat, tentu saja ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda beda satu sama lainnya. Perbedaan-perbedaan karakteristik yang dimilikinya tersebut biasanya berkaitan dengan tingkat stratifikasi sosial serta diferensiasi. Masyarakat yang seperti ini yang dikenal dengan masyarakat multikultural. Walaupun telah berkembang sejak tahun 1960-an, makna dan ruang lingkup multikulturalisme tetap masih terus diperdebatkan sampai saat ini sebagai sebuah konsep.

Secara umum multikulturalisme mengacu pada pengakuan terhadap keanekaragaman [1], dan perbedaan yang hidup dalam kesetaraan secara harmonis dan bermartabat, sehingga membentuk keadaan yang saling terintegrasi dengan sifat dasar yang inklusif, baik dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun warga negara. Multikulturalisme dimaknai sebagai modal sosiokultural yang mampu mengatasi berbagai halangan yang ada karena keragaman itu.

Namun di sisi lain, multikulturalisme dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan, menghalangi tumbuh kembangnya meritokrasi, dan penyebab yang memperburuk konflik. Misalnya dalam hal konflik keagamaan, hampir di seluruh wilayah Indonesia pernah mengalami konflik keagamaan dengan menggunakan aksi damai ataupun kekerasan. [2] konflik etnik juga kerap terjadi di Indonesia.

Sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika, Canada, Australia adalah sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan pendidikan multikultural, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lain untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultur mereka sebelumnya, atau kultur nenek moyang tanah asalnya. Dalam sejarahnya, menurut Melani Budianta, multikulturalisme diawali dengan teori *melting pot* yang sering diwacanakan oleh J. Hector seorang imigran asal Normandia. Dalam teorinya, Hector menekankan penyatuan budaya dan melecehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika, walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur White 2014 Anglo Saxon Protestant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal Eropa. [3] Sementara itu di luar dunia Barat, multikulturalisme dibangun tanpa acuan budaya dan pengalaman sejarah yang jelas, di mana prinsip-prinsip dasarnya akan diberlakukan.

Untuk itu, pembahasan terkait aspek budaya dan historis memiliki peran penting dalam multikulturalisme. Keberadaan kebudayaan dan historiografi tertentu bersifat hegemoni yang diadopsi sebagai penentu standarisasi, menghasilkan eksklusivisme baru, yang sekaligus membangun keterasingan dan diskriminasi.

Selanjutnya tantangan memahami dan merapkan nilai-nilai multikulturalisme juga berhadapan dengan beberapa konsep tandingan seperti konsep *multietnis*, *multiagama*, *multinasional*, *multibahasa*, *asimilasi*, *interkulturalisme*, *transkulturalisme* dan lain sebagainya.

Dari berbagai ulasan di atas, beberapa hal yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan multikulturalisme dan inklusi sosial antara lain, minoritas, mayoritas, kesadaran masyarakat sebagai sebuah sistem sosiokultural dan intervensi negara. Dalam makalah ini pembahasan akan dilakukan dengan menitik beratkan pada perspektif historiografi.

Pada akhirnya makalah ini hanya mengajak para pembaca untuk memikirkan kembali bagaimana multikulturalisme diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Apakah *Bhineka Tunggal Ika* merupakan manifestasi dari multikulturalisme ala Indonesia? Dan jika ya, dalam hal apakah Pancasila dan UUD 1945 beserta aturan perundang-undangan yang menyertainya merupakan representasi dan perwujudan dari kenyataan inklusif yang diproduksi dari pengalaman historis bangsa Indonesia?

2. Pembahasan

Beberapa sumber persoalan yang penting dilirik sebelum membahas multikulturalisme dalam perspektif historiografi antara lain adalah persoalan bagaimana merayakan perbedaan yang berlawanan dengan tuntutan keseragaman. Umumnya tidak ada perayaan keragaman, yang ada hanya merayakan keseragaman. Menjadi berbeda adalah hal yang sangat menakutkan. Terlebih, jika perbedaan itu bukan lagi sekedar berbeda secara minoritas, melainkan berbeda sendiri. Padahal, kenyataannya, kita semua memang berbeda, namun kita selalu mencari-cari persamaan yang ada dalam diri kita dengan orang lain agar kita tidak tersisih dari pergaulan luar. Pendefinisian tentang diri kita membuat kita berbeda dari orang lain. Semakin tajam perbedaannya, semakin kita sadar, tidak ada orang yang sama dengan diri kita. Saya adalah satu-satunya saya di dunia ini. Seberapa banyakpun persamaan yang saya miliki dengan (jika saya memiliki) kembar identik sekalipun, kami pasti tetap memiliki perbedaan. Banyak sekali keluhan-keluhan mengenai keragaman yang kita miliki. Perbedaan asal negara, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, bahkan perbedaan untuk mereka yang mengalami cacat mental, cacat fisik, dan orientasi seksual membuat kita merasa perbedaan merupakan hal yang negatif, kemudian mengeluhkannya.

Selanjutnya persoalan mengarusutamakan minoritas dan memarginalkan mayoritas. Dalam rentang sejarah bangsa ini, keberadaan kelompok-kelompok minoritas ini sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Meskipun secara konstitusional negara memberi jaminan terhadap keberadaan kelompok minoritas, namun faktanya banyak kelompok yang tidak bisa leluasa mengamalkan dan mengembangkan agama dan keyakinan mereka. Hingga hari ini, sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama dan berkeyakinan masih menghisai wajah buruk hubungan antar mayoritas dan minoritas. Ironisnya, munculnya perlakuan diskriminatif ini justru dilakukan oleh negara

melalui penerbitan serangkaian peraturan yang kemudian dijadikan justifikasi oleh kelompok mayoritas untuk memusuhi dan meminggirkan kelompok minoritas. Perlakuan seperti ini terjadi dalam beberapa bentuk seperti: klaim penyusutan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan, penutupan tempat ibadah, larangan mengembangkan dan mendakwahkan keyakinan, hingga pembatasan hak-hak politik dan akses ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana memadukan antara kepentingan mayoritas dan melindungi hak-hak minoritas serta berbagai upaya mencari formulasi yang tepat mengenai hubungan mayoritas dengan minoritas menjadi sesuatu yang tidak hanya penting tetapi juga merupakan suatu keharusan.

Warisan Indische Partij

Indische Partij (Partai Hindia) adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, didirikan tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia yang memperjuangkan anti kolonialisme dan nasionalisme. Terdapat petikan dari surat yang ditulis oleh E.F.E. Douwes Dekker salah satu pendiri *Indische Partij* kepada Ratu Belanda pada tahun 1913, “bukan yang Mulia...Ini bukan negerimu. Ini adalah negeri kami, tanah air kami. Suatu hari ia akan merdeka, selamanya”.

Akan tetapi, ide tentang Indonesia sebagai satu kesatuan tanah air bagi seluruh mereka yang telah menjadi penduduk di dalamnya sebagaimana dikampanyekan oleh *Indische partij* tidak diterima dengan mudah, baik pada masa kolonial maupun ketika Indonesia sudah merdeka.

Peranan *Indische partij* di sisi lain menjadi pemikiran bagi kita, bahwa dalam perjuangan Indonesia sebagai negara kesatuan dibayangi oleh kontestasi atas “asli” dan hak menyatakan “asing” bagi yang lain. Masing-masing kelompok berpegang pada masing-masing prinsip yang terpisah, antara yang berpegang pada kesamaan/perbedaan kultural dengan yang memfokuskan pada pengalaman kolonial.

Ideologi *Indische Partij* yang didasarkan prinsip-prinsip inklusif juga dipandang secara umum dari perspektif nasionalisme Indonesia sebagai manifestasi politis dari kelompok “minoritas” dan tidak pernah menjadi narasi bangsa yang berpengaruh.

Peran Historiografi

Dalam khazanah ilmu sejarah, istilah historiografi digunakan untuk menyebut langkah terakhir dari metode penelitian sejarah, yaitu proses menyusun secara tertulis hasil temuan-temuan yang diperoleh dalam satu penelitian sejarah menjadi cerita yang siap untuk dibaca para pembacanya. [4] Proses penyusunan hasil-hasil temuan penelitian sejarah menjadikan historiografi berperan mencerahkan masyarakat dan memiliki sumbangan terhadap pemecahan persoalan kekinian dan masa yang akan datang.

Historiografi dan proses produksi naratif besar sejarah bangsa, inklusi dan eksklusi.

Menjawab pertanyaan terkait siapa pemilik Indonesia? Nasionalisme, hak atas sejarah, dan hak sebagai warga negara, cakupan bangsa Indonesia dan titik temu antara penduduk dan warga negara.

Eksklusivisme

Eksklusivisme internal sejak awal telah membayangkan-bayangi munculnya kesadaran baru tentang kebangsaan Indonesia, di tengah-tengah keanekaragaman masyarakat kolonial. Politik segregatif dan diskriminatif kolonial dikonversi menjadi kesadaran parsial, adanya pemisahan yang tegas antara Bumiputra yang tertindas dengan berbagai kelompok primordial lain yang dianggap menikmati kejayaan kolonialisme, yang dibangun atas perbedaan kultural.

Hegemoni.

Komunitas peranakan baik Eropa maupun Tionghoa terjebak bersama-sama dengan kelompok totok lainnya yang tidak bisa disatukan dengan Bumiputra, walaupun mereka hanya tahu bahwa Hindia Belanda adalah satu-satunya tanah airnya. *Inlander* bertransformasi menjadi Bumiputra dan akhirnya Pribumi. Memperebutkan hak sebagai warga negara ketika Indonesia merdeka.

Di dalam perkembangannya terjadi dikotomi internal di dalamnya. Dikotomi yang tajam di antara mereka yang dikonstruksi oleh kolonialisme sebagai Bumiputra. Bumi Putera mengambil peran memperebutkan hak sebagai yang paling utama di antara warga negara ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya.

Dari sini cukup tampak bahwa ketika bangunan narasi historiografi dipakai dalam memahami soal multikulturalisme dan inklusi sosial di Indonesia, maka satu sisi akan mengancam prinsip-prinsip dasar

multikulturalisme dan inklusi sosial itu sendiri. Hal ini karena pemahaman tentang multikulturalisme dan inklusi sosial di Indonesia sarat dengan beban masa lalu.

Kenyataan sosiologis kekinian sebagaimana menjadi referensi utama dari perdebatan dengan multikulturalisme dan inklusi sosial di dunia Barat bukan faktor penting di Indonesia.

Pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran bahwa pemaknaan tentang multikulturalisme dan inklusi sosial mengacu pada standarisasi yang dikonsepsikan dalam tradisi Barat.

3. Kesimpulan

Dalam perspektif historiografi multikulturalisme di Indonesia tidak terlepas dari jerat masa lalu yang mengindikasikan adanya warisan kolonialisme yang tergambar melalui eksklusivisme, hegemoni dan dikhotomi internal di dalamnya.

Hingga menjadi pertanyaan besar hingga kini untuk diketahui, apakah Bhineka Tunggal Ika merupakan manifestasi dari multikulturalisme ala Indonesia dan Dalam hal apakah Pancasila dan UUD 1945 beserta aturan perundang-undangan yang menyertainya merupakan representasi dan perwujudan dari kenyataan inklusif yang diproduksi dari pengalaman historis bangsa Indonesia.

Referensi

- [1]. Mubit R. PERAN AGAMA DALAM MULTIKULTURALISME MASYARAKAT INDONESIA. *Epistemé J Pengemb Ilmu Keislam* [Internet]. 2016 Jun 9;11(1):163–84. Available from: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/104>
- [2]. Adhani Y. KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI SARANA ALTERNATIF PENCEGAHAN KONFLIK. *SOSIO Didakt Soc Sci Educ J* [Internet]. 2014 Jun 29;1(1). Available from: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK/article/view/1211>
- [3]. Rosyada D. Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *SOSIO Didakt Soc Sci Educ J*. 2014;1(1).
- [4]. Subekti S. Tinjauan Kritis Terhadap Kecenderungan Historiografi Indonesia Masa Kini, *HUMANIKA*, vol. 15, no. 9, Jan. 2012. <https://doi.org/10.14710/humanika.15.9>.